



KR-Franz Boedisukamanto

**REZEKI RAMADAN: Heri Kiswanto (34) asal Jogoragan, Banguntapan, Bantul, melayani pembeli es kelapa muda di depan Pasar Kotagede, Yogyakarta, Minggu (9/3/2025). Selama Ramadan 1446 H setiap hari terjual 150-170 butir kelapa muda, untuk utuh murni harga Rp 10.000/buah sedang yang siap minum dijual Rp 3.000-Rp 3.500/gelas.**

## TEMUAN MINYAKITA TAK SESUAI TAKARAN Satgas Pangan Polri Sita Barang Bukti

**JAKARTA (KR)** - Satgas Pangan Polri menyelidiki temuan adanya minyak goreng kemasan bermerek MinyaKita yang dijual di pasaran tidak sesuai dengan takaran yang disebutkan oleh produsen pada label kemasan.

Penyelidikan itu merupakan tindak lanjut pihaknya usai menemukan adanya ketidaksesuaian pada produk MinyaKita dalam inspeksi yang dilakukan di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

"Dilakukan pengukuran terhadap tiga merek MinyaKita yang diproduksi oleh tiga produsen yang berbeda, dan ditemukan ukurannya tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam label kemasan. Hasil pengukuran sementara, dalam label tercantum 1 liter, tetapi ternyata hanya berisi 700-900 mililiter," ucap Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helifi Assegaf di Jakarta, Minggu (9/3).

Disebutkan nama tiga produsen tersebut, yakni PT Artha Eka Global Asia yang berlokasi di Depok,

Jawa Barat, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara yang berlokasi di Kudus Jawa Tengah dan PT Tunas Agro Indolestari yang berlokasi di Tangerang Banten. Adapun sampel yang diuji dari produsen PT Artha Eka Global Asia dan Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara adalah botol MinyaKita berukuran 1 liter, sedangkan sampel dari PT Tunas Agro Indolestari adalah MinyaKita kemasan pouch berukuran 2 liter. "Atas temuan tersebut, Satgas Pangan Polri menyita barang bukti dan melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," ucap Helifi.

Sebelumnya, Sabtu (8/3), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi men-

dadak ke Pasar Lenteng Agung Jakarta Selatan, untuk memeriksa kabar soal MinyaKita yang tidak sesuai dengan takaran. Dalam inspeksi tersebut, ditemukan minyak goreng kemasan dengan merek MinyaKita yang tidak sesuai dengan aturan dan di atas harga eceran tertinggi (HET). Minyak tersebut diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara, dan PT Tunas Agro Indolestari.

Menanggapi temuan ini, Mentan menegaskan bahwa praktik seperti itu sangat merugikan masyarakat dan tidak bisa ditoleransi. Mentan meminta agar perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran segera diproses secara hukum dan ditutup.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim dan Satgas Pangan. Jika terbukti ada pelanggaran, perusahaan ini harus ditutup dan izinnya dicabut," tandas Mentan.

(Ant/Has)-f

**DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI**

**BEA CUKAI  
Mahin Baik**  
BERGASASI & MELAYU

# GEMPU ROKOK ILEGAL

**PELANGGARAN UNDANG-UNDANG CUKAI**

**YUK KENALI ROKOK ILEGAL**

Pita cukai palsu paling sulit dikenali. Tetapi biasanya gambar atau warna pita cukai palsu ini akan terlihat berbeda dengan yang asli.

Kemasan produk rokok ini menggunakan pita cukai yang tidak sesuai nama perusahaan atau juga beda jenis produk. Misi pita cukai untuk produk rokok merek GRTI, tapi digunakan pada produk rokok filter SGM.

Kemasan produk rokok ini menggunakan pita cukai bekas pakai. Biasanya terlihat bekas sobek, berkerut, atau tusut.

Tidak ada pita cukai yang ditempel pada kemasan produk rokok ini.

**LAPORKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL  
KE KANTOR BEA CUKAI MAGELANG  
ATAU HUBUNGI NOMOR **08112640225****

BEACUKAIMAGELANG PENGADUAN.BCMAGELANG@GMAIL.COM

## PROYEK TANGGUL LAUT RAKSASA

### Diwujudkan untuk Lindungi Pesisir

**JAKARTA (KR)** - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, proyek tanggul laut raksasa atau *Giant Seawall* harus diwujudkan sebagai upaya perlindungan kawasan pesisir.

Giant Sea Wall adalah struktur besar yang dibangun di sepanjang garis pantai untuk memisahkan daratan dan laut, dengan tujuan utama mencegah erosi dan kerusakan akibat gelombang. Di Jakarta, konsep ini diwujudkan melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), yang dirancang untuk melindungi kota Jakarta dari ancaman banjir rob dan penurunan permukaan tanah.

"Ke depan, proyek tanggul laut raksasa atau

Giant Seawall harus diwujudkan sebagai bagian dari upaya perlindungan kawasan pesisir," ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/3).

Ia juga menyoroti dampak krisis iklim dan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi, termasuk di wilayah pantai utara. Ia menekankan, faktor perubahan iklim ini harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif.

Pemerintah berkomitmen untuk mengawal proses pemulihan dan memastikan langkah-langkah mitigasi jangka panjang dapat segera terealisasi demi melindungi masyarakat dari dampak banjir di masa mendatang. Dengan koordinasi yang kuat dan aksi nyata

di lapangan, diharapkan penanganan banjir dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nor 12 Tahun 2025 mengenai Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memerlukan dukungan dari pemerintah.

Perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian PSN merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan nasional. PSN ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden. Penetapan PSN dilaksanakan melalui mekanisme rencana kerja pemerintah.

Proyek-proyek yang

diusulkan dan dilaksanakan selain oleh pemerintah pusat merupakan bentuk kontribusi pemda, BUMN dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memerlukan dukungan dari pemerintah.

Perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian PSN merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan nasional. PSN ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden. Penetapan PSN dilaksanakan melalui mekanisme rencana kerja pemerintah.

(Ant/Obi)-f

## Hikmah Ramadan

### Puasa dan Makna Kejujuran

**KORUPSI** beribu-ribu triliun rupiah di negeri ini, sebenarnya dapat diduga dan dicegah, bila bangsa ini mau dan mampu menggunakan kecerdasan spiritual-religius dalam mengawal penyelenggaraan negara. Sayangnya, olah akal tanpa hati-nurani, dominasi nafsu duniawi untuk kepentingan, atas nama demokrasi liberal, dan praktik pernekonomian kapitalistik, justru terus dikembangkan.

Esensinya, ketika banyak orang munafik/hipokrit, berpeyakit *wahn* (cinta dunia berlebihan), pemimpin negeri ini, maka kejujuran telah tergantikan dengan kedustaan. Bencana sosial-kebangsaan pun menjadi tak terelakkan. Sungguh memilukan. Para pemimpin mengaku muslim/muslimah, tetapi berperilaku korup, memperturutkan hawa nafsu. Mereka berpuasa hanya di tataran lahiriah, agar tercitra sebagai seolah-olah muslim, mukmin, dan muttaqin. Padahal, kedustaan berpelotan dalam jiwanya.

Hakikat puasa adalah pengendalian diri dari hasutan/dorongan hawa nafsu. Orang berhasil ibadah puasanya, bila irama dan keselarasan kehidupannya senantiasa berada dalam kedamaian. Tiada jalan ditempuhnya, kecuali berdasar kejujuran, kebenaran, melangkah di jalan lurus (*sirathal mustakim*).

Puasa adalah ibadah yang sarat ajaran kejujuran. Jujur (*as-shidqu* atau *shidiq*), artinya benar atau nyata. Jujur adalah sikap batin maupun lahir, terhadap sesuatu hal untuk dinyatakan apa adanya. Realitas apapun disampaikan sebagai kebenaran sejati (objektif), tanpa reduksi ataupun penambahan, barang sedikitpun. Kebalikan dari jujur adalah dusta (*al-kidzbu*). Sikap ini mesti/wajib ditabukan.

Rasulullah Saw bersabda: "Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur, dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian. Jangan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta, dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta." (HR Muslim no. 2607).

**Sudjito Atmoredjo**



Jadi, pada dimensi religius, seseorang yang jujur, selalu berada dalam kedamaian, ketenangan, ketenteraman. Orang jujur dijamin masuk surga. Sebaliknya, kedustaan, merupakan benih dan virus kejahatan. Ujungnya, azab dan neraka. Itulah hadiah terbaik bagi pelakunya.

Idealnya, kejujuran menjadi karakter dan jati diri semua warga negara dan penyelenggara negara. Segala urusan, mestinya diselenggarakan atas dasar kejujuran. Jangan pernah, kejujuran, dimunculkan hanya sebagai pencitraan, untuk menutupi kedustaan dan kejahatannya.

Ingat, pengenalan terhadap kejujuran dan kedustaan, tidak bisa hanya dilihat pada perilaku sesaat, berdasar tangkapan mata-kepala. Sebagai perbuatan laten, kejujuran dan kedustaan, mesti dikenali melalui pendekatan sosiologis-religius. Artinya, kesejatan perbuatan/perilakunya, mesti dicermati seksama sepanjang perjalanan kehidupan pelakunya di tengah masyarakat (dan bangsa), berdasarkan nilai-nilai agama.

Cermatilah, ketika seseorang dihadapkan pada kesempatan, punya kepentingan pribadi, ataupun dalam kesendirian, benarkah ia jujur, ataukah jujur hanya ketika ada pengawasan orang lain. Pada rona dinamika kehidupan demikian, kejujuran atau kedustaan terdeteksi.

Benar, secara yuridis-normatif, perilaku jahat (korup, manipulatif, dusta, dsb.) dapat ditindak berdasar hukum berlaku. Tetapi penting diingat, bahwa dalam perspektif politis, hukum, sering digeser fungsinya, menjadi alat penaklukan, dan sarana bisnis. Kedua fungsi hukum tersebut, marak dipraktikkan pada jagat politik dan bisnis. Oligarki begitu dominan mengendalikan praktik-praktik politik dan bisnis, demi kepentingannya. Hukum dibuat, dilaksanakan, dan ditegakkan secara diskriminatif. Tumpul ke atas, tajam ke bawah.

Dalam bingkai puasa Ramadan, berdasarkan iman, dan demi ketakwaan kepada Allah SWT, hendaknya kejujuran dan keberanian, dijadikan modal/alat perlawanan terhadap koruptor dan oligarki. Dalam bimbingan, bantuan, pertolongan-Nya, diyakini kemenangan pasti dapat diraih. *Wallahu'alam.* (\*)-f

(Prof Dr Sudjito Atmoredjo SH,  
Guru Besar pada Sekolah  
Pascasarjana UGM).

## TUNGGU PROSES ADMINISTRASI SELESAI

### WNA India Dideportasi Usai Keluar Lapas

**YOGYA (KR)** - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Yogyakarta memroses deportasi seorang warga negara asing (WNA) asal India berinisial EH setelah menyelesaikan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta. EH yang terjerat kasus penyelundupan 2.800 gram sabu di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada tahun 2013 telah dijemput petugas Imigrasi dan diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Semarang, Jawa Tengah, Jumat (7/3).

Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta Tedy Riyandi dalam keterangannya di Yogyakarta, Sabtu (8/3) mengatakan, EH langsung diserahkan

ke Rudenim Semarang untuk menjalani penahanan sementara hingga seluruh administrasi deportasi rampung. "Tindakan tegas Imigrasi terhadap orang asing bermasalah diharapkan dapat menjadi efek jera bagi WNA lain agar patuh dan tunduk menghormati hukum serta norma yang berlaku di Indonesia," katanya.

Tedy menambahkan EH tidak ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Yogyakarta karena fasilitas tersebut masih dalam renovasi. EH dititipkan di Rudenim Semarang sambil menunggu proses pemulangan ke negara asalnya.

Untuk memastikan deportasi berjalan sesuai prosedur, Imigrasi Yogyakarta telah berkoordinasi dengan

Kedutaan Besar India di Jakarta, terutama terkait penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atau emergency passport, sebagai dokumen perjalanan EH kembali ke negaranya.

Sementara itu, Kepala Subseksi Keamanan Rudenim Semarang Dany Astrianto mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara Kantor Imigrasi Yogyakarta dan pihak terkait dalam menangani kasus ini. "Kami juga akan terus bersinergi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa WNA yang berada di Wilayah Hukum Jawa Tengah dan sekitarnya mematuhi peraturan dan norma yang berlaku," kata Dany.

(Ant/Has)-f